G20 PRESIDENCY OF INDONESIA

RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER

G20
INDONESIA
2022

BAB VI

PRESIDENSI G20 INDONESIA: SINERGI GLOBAL MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI

Satu agenda global penting yang dilakukan pada 2022 dan berkaitan dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi global ialah Presidensi G20 Indonesia 2022, yang mengambil tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Berbagai agenda dibahas secara intensif di Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia berjalan sangat baik dan mampu menghasilkan komunike bersama dari seluruh anggota G20, meskipun pada saat bersamaan tensi ketegangan geopolitik masih tinggi. Kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini tidak terlepas dari peran strategis sinergi yang kuat, baik antar-pemangku kepentingan di Indonesia maupun koordinasi dengan negara-negara anggota, dalam mencapai tujuan yang sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia.

Satu agenda global penting yang dilakukan pada 2022 dan berkaitan dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi global ialah Presidensi G20 Indonesia 2022 yang mengambil tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Presidensi G20 Indonesia menetapkan melalui 4 (empat) pilar yang dijabarkan dalam pembahasan di Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa. Keempat pilar tersebut meliputi upaya mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia, meningkatkan daya tahan perekonomian yang makin tangguh dan berkelanjutan, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat lingkungan yang mendukung dan kemitraan.

Secara lebih rinci, pembahasan di Jalur Keuangan pada Presidensi G20 Indonesia meliputi 6 (enam) agenda prioritas. Keenam agenda tersebut ialah (i) *Exit Strategy to Support Recovery;* (ii) *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth;* (iii) *Payment System in Digital Era;* (iv) *Sustainable Finance;* (v) *Digital Financial Inclusion;* dan (vi) *International Taxation.* Sejalan dengan berbagai agenda prioritas tersebut, berbagai tantangan global mengangkat paling tidak 5 (lima) isu strategis dan menjadi topik pembahasan utama di Jalur Keuangan Presidensi G20 Indonesia. Kelima isu tersebut meliputi diskusi mengenai (i) bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan ketahanan pangan akibat gangguan pasokan; (ii) bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif; (iii) bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi; (iv) bagaimana *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat dirancang untuk memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta bagaimana memitigasi dampak negatif dari aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif; dan (v) bagaimana upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan, menuju *net zero carbon emissions*.

Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia berjalan sangat baik dan mampu menghasilkan komunike bersama dari seluruh anggota G20, meskipun saat bersamaan tensi ketegangan geopolitik masih tinggi. Kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tidak terlepas dari peran penting sinergi yang kuat, baik antar-pemangku kepentingan di Indonesia maupun dengan negara-negara anggota, dalam mencapai tujuan yang sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Sinergi ini dapat membangun *chairs' summary* yang dapat meringkas isu-isu pelik, baik yang telah bisa maupun belum mendapat kesepakatan. Pelajaran sukses tentang pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini akan menjadi modal penting untuk pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, yang secara umum juga akan merumuskan sejumlah agenda yang selaras dengan Presidensi G20 Indonesia.

6.1

Mengenal *Group of Twenty* (G20)

Kelompok dua puluh atau *group of twenty* (G20) ialah forum pemimpin untuk melakukan kerja sama ekonomi internasional. G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) dan merupakan gabungan negara maju dan negara berkembang, serta merepresentasikan lebih dari 80% PDB dunia.[5] Tujuan dari forum ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Sejak awal pembentukannya pada 1999, G20 terus menunjukkan perannya sebagai forum ekonomi utama dunia. G20 berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur dan tata kelola global pada isu-isu utama dalam ekonomi internasional.[6] G20 tidak hanya fokus pada isu makroekonomi dan keuangan, namun juga isu perdagangan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, agrikultur, energi, lingkungan dan antikorupsi.

Pada awal pembentukan, G20 merupakan forum bagi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam merespons berbagai krisis. Forum mendiskusikan respons kebijakan dan memperkuat perekonomian dunia dalam menghadapi berbagai krisis yang berdampak global seperti *Mexican Peso Crisis* 1994, *Asian Financial Crisis* 1997/1998, dan *Russian Financial Crisis* 1998. Pada 2008, di tengah krisis keuangan global, AS menginisiasi pertemuan kepala negara/pemerintahan G20, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang makin memperkuat relevansi G20 sebagai forum ekonomi utama dunia.

Sejak 2010, pertemuan level menteri G20 makin meluas, meliputi, antara lain, perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan, dan luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, maka saat ini G20 memiliki dua kelompok kerja, yaitu Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Jalur Keuangan terdiri atas kementerian keuangan dan bank sentral masing-masing negara, sementara Jalur Sherpa terdiri atas kementerian/lembaga lainnya yang relevan.

G20 menjalankan fungsinya melalui presidensi yang ditetapkan melalui konsensus. Hal ini mengingat G20 tidak memiliki Ketua dan Sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Karena G20 tidak memiliki sekretariat tetap, maka fungsi untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika, yaitu negara yang sedang menjabat presidensi, negara yang menjabat satu tahun sebelum, serta negara yang akan menjabat di tahun berikutnya. Presidensi G20 Indonesia pada 2022 melanjutkan kepemimpinan Italia pada 2021.

5 Negara maju: Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Perancis, dan Uni Eropa.
Negara berkembang: Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Brazil, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Tiongkok, dan Turki.

6 Diambil dari: https://www.g20.org/en/about-g20/#overview

6.2

Presidensi G20 Indonesia 2022

Indonesia pada 2022 mengambil peran penting di forum strategis global ini dengan menjadi Presidensi G20 dan mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Sejalan dengan tema ini, Presidensi G20 Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berperan sebagai *lead* pada pelaksanaan pertemuan G20 Jalur Keuangan, sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai *lead* pada Jalur Sherpa. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen anggota G20 untuk berkonsultasi dengan komunitas pemangku kepentingan yang relevan, dialog difasilitasi melalui *Engagement Group* yang terdiri dari peserta nonpemerintah dari setiap anggota G20.

Presidensi G20 Indonesia menetapkan melalui 4 (empat) pilar dalam mendukung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". *Pertama*, mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia. *Kedua*, meningkatkan daya tahan perekonomian yang makin tangguh dan berkelanjutan. *Ketiga*, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. *Keempat*, memperkuat lingkungan yang mendukung dan kemitraan. Keempat pilar tersebut diejawantahkan ke dalam agenda pembahasan pada dua jalur, yaitu Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa (Gambar 6.1).

6.2.1. Presidensi G20 Indonesia – Jalur Keuangan

Pada Jalur Keuangan, Presidensi Indonesia menetapkan 6 (enam) agenda prioritas G20 untuk mendukung tema "*Recover Together, Recover Stronger*".[7] Keenam agenda tersebut ialah (i) *Exit Strategy to Support Recovery*; (ii) *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*; (iii) *Payment System in Digital Era*; *(iv) Sustainable Finance*; (v) *Digital Financial Inclusion*; dan (vi) *International Taxation*.

Dua agenda pertama saling terkait, yakni *Exit Strategy to Support Recovery* dan *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*. Agenda *pertama*, *Exit Strategy to Support Recovery*, ditujukan untuk memastikan kebijakan *exit strategy* yang efektif dan dapat memitigasi efek rambatan sebagai prioritas bagi pembuat kebijakan di setiap negara. Agenda ini akan fokus pada strategi kebijakan untuk pulih bersama dari krisis, yang dapat dicapai melalui *framework of policy mix* yang *well-calibrated*, *well-planned*, dan *well-communicated*. Agenda *kedua*, *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*, diarahkan pada upaya mitigasi dampak jangka panjang untuk mengatasi *scarring effect* dari pandemi, dengan beberapa area yang menjadi perhatian adalah aspek ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

Agenda *ketiga*, *Payment System in Digital Era*, diarahkan untuk melanjutkan pembahasan mengenai implementasi *Roadmap for Enhancing Cross Border Payments* (CBP) yang ditetapkan di bawah Presidensi Arab Saudi 2020. *Roadmap* bertujuan untuk mengatasi empat tantangan, yaitu biaya yang tinggi, kecepatan pembayaran yang rendah, akses yang terbatas, dan transparansi yang rendah. Beberapa aspek yang menjadi fokus adalah sistem pembayaran yang terhubung untuk transaksi lintas batas negara, harmonisasi protokol *Application Programming Interfaces* (API) untuk pertukaran data, serta pembahasan mengenai *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Agenda *keempat*, *Sustainable Finance*, diarahkan pada pembahasan risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan *sustainable finance* dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi G20 *Sustainable Finance Roadmap*, dengan pengelompokan pada tiga fokus area. Ketiga fokus area tersebut ialah *(i) developing a framework for*

7 Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (2021)

Gambar 6.1. Jalur Pertemuan Forum G20

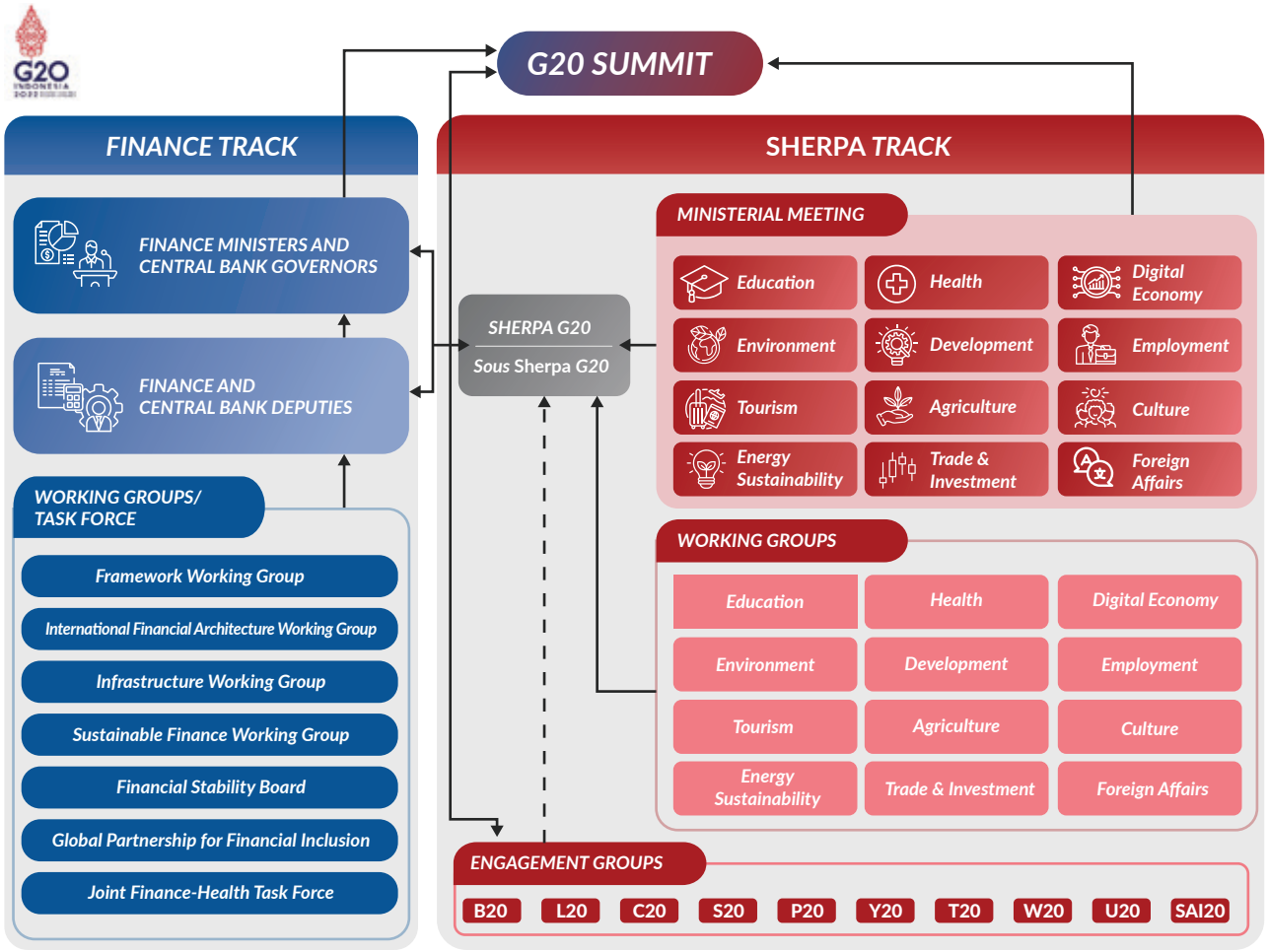

Sumber: G20

transition finance; (ii) enhancing accessibility and affordability of sustainable finance instruments, dan; *(iii) discussing policy levers that incentivize financing and investment towards transition activities.*

Agenda *kelima*, *Digital Financial Inclusion*, fokus pada pembahasan integrasi sisi penawaran dan permintaan sektor keuangan untuk mempromosikan inklusi keuangan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan inklusi ekonomi. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa di satu sisi, pandemi Covid-19 telah memperlebar kesenjangan masyarakat kelompok rentan, termasuk kaum perempuan dan UMKM. Sementara, di sisi lain, pandemi juga berdampak pada digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat sehingga meningkatkan akses kelompok rentan tersebut pada layanan keuangan dan sumber pembiayaan. Agenda *keenam*, International Taxation, melanjutkan diskusi implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital yang telah dicapai pada 2021. Dalam kaitan ini, G20 menargetkan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern.

Selain agenda prioritas, Presidensi G20 Indonesia juga melanjutkan diskusi beberapa *legacy agenda* yang sudah sempat diinisiasi oleh presidensi-presidensi sebelumnya. Adapun *legacy agenda* tersebut adalah (i) *integrating pandemic and climate risks in global risk monitoring*; (ii) *strengthening the Global Financial Safety Net (GFSN)*; (iii) *improving capital flows*; (iv) *continuing work on data gap initiatives*; (v) *enhancing financial sector regulation reforms*; (vi) *strengthening debt sustainability and debt transparency*; (vii) *accelerating the infrastructure agenda toward sustainable and inclusive development*; (viii) *leveraging Multilateral Development Banks' support*; (ix) *strengthening Pandemic Prevention, Preparedness and Response*; dan (x) *continuing support for attracting private sector investment in low-income countries, such as in the African region, through the Compact with Africa*

(CwA). Agenda prioritas dan *legacy* Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang.

6.2.2. Lima Isu Strategis Terkini

Sejalan dengan berbagai agenda prioritas tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga mengangkat paling tidak 5 (lima) isu strategis dan menjadi topik pembahasan utama di Jalur Keuangan untuk menjawab tantangan global.[8] Tantangan global tersebut berkaitan dengan risiko pertumbuhan ekonomi global pascapandemi Covid-19 yang melambat dan diiringi tekanan inflasi yang meningkat. Krisis geopolitik Rusia-Ukraina serta pandemi Covid-19 meningkatkan risiko perekonomian global, termasuk dampak dari gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut diperburuk dengan kebijakan *inward looking*, khususnya untuk komoditas pangan sehingga mendorong kenaikan harga komoditas internasional dan meningkatkan tekanan inflasi global. Beberapa kondisi kemudian memicu makin tingginya ketidakpastian global seperti pengetatan kebijakan moneter global dan naiknya ketidakpastian pasar keuangan global yang telah memperburuk tekanan mata uang negara berkembang.

Kelima isu strategis yang banyak dibahas meliputi berbagai aspek penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan terus dibahas oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Jalur Keuangan. *Pertama* adalah bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan ketahanan pangan akibat gangguan pasokan. *Kedua* adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif. *Ketiga* adalah bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi. *Keempat* adalah bagaimana CBDC dapat dirancang untuk memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Selain itu, bagaimana memitigasi dampak negatif dari aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif. Terakhir, *kelima* adalah bagaimana upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan, menuju *net zero carbon emissions*.

Untuk isu strategis pertama yang terkait dengan upaya memperkuat kesehatan dan ketahanan pangan global, G20 telah melakukan rangkaian inisiatif di tengah masih berlanjutnya pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasokan. Dari sisi kesehatan, G20 telah membentuk *Financial Intermediary Fund* untuk memastikan pembiayaan yang msemadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), dan penanggulangan (*response*) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen sebesar 1,5 miliar dolar AS. Dari sisi ketahanan pangan, G20 telah membentuk *Global Collaboration and Cooperation* untuk membahas dan mengatasi tantangan kerawanan pangan yang meningkat. Kolaborasi dan koordinasi tersebut memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (*affordability*) dan kemudahan perolehan (*accessibility*) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk.

Pada isu strategis kedua terkait bauran kebijakan yang efektif, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan berbagai capaian, termasuk melalui dukungan data yang lengkap, akurat, dan andal. Kebijakan terkait *exit strategy* menjadi salah satu isu utama untuk mendukung pemulihan dan mengatasi *scarring effect* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. G20 *Presidency Note* merupakan satu acuan *exit strategy* dari berbagai kebijakan yang ditempuh sebagai mitigasi dampak negatif pandemi serta sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi dampak buruk akibat pandemi.[9] Laporan Financial Stability Board (FSB) juga memuat rekomendasi dan implementasi kebijakan tentang *exit strategy* dari kebijakan yang ditempuh untuk memitigasi dampak negatif pada sektor keuangan.[10] Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dapat lebih merata,

8 Sumber: Siaran Pers Bank Indonesia "Presidensi G20 Jalur Keuangan Menjawab Lima Isu Strategis Global Guna Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi". Diambil dari: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419222.aspx

9 *G20 Presidency Note on Policy Setting for Exit Strategies to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.*

10 *FSB - Financial policies in the wake of COVID-19: supporting equitable recovery and addressing effects from scarring in the financial sector.*

berkelanjutan, dan inklusif. Selain itu, dukungan data yang lengkap, akurat, dan andal juga sangat diperlukan untuk memperkuat integrasi kebijakan makroekonomi. IMF dan FSB telah membangun *IMF-FSB Report on the G20 Data Gaps Initiative (DGI-2): Progress Achieved, Lessons Learned, and the Way Forward* sebagai capaian Presidensi G20 Indonesia. Laporan tersebut memaparkan pengembangan kerangka kerja konseptual dan perbaikan cakupan data, ketepatan waktu, dan frekuensi data. Kerangka kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis kebijakan, termasuk penilaian risiko makroprudensial dan stabilitas keuangan.

Presidensi G20 Indonesia juga mendorong penguatan lembaga keuangan nonbank, sebagai bagian upaya penguatan ketahanan sistem keuangan global. Dalam kaitan ini, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan 2 (dua) capaian pada area ini. *Pertama* adalah Laporan FSB yang menguraikan program kerja *Non-Bank Financial Intermediation* (NBFI) dengan fokus pada penilaian dan penanganan kerentanan pada area tertentu yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas.[11] Area yang diperiksa termasuk dana pasar uang, dana terbuka, praktik *margining*, likuiditas pasar obligasi, dan interaksi pendanaan lintas batas dolar AS dengan kerentanan di ekonomi negara berkembang. *Kedua* adalah serangkaian proposal kebijakan dari FSB untuk mengatasi risiko sistemik di NBFI. Pada 2023, FSB akan menempuh langkah untuk mengatasi *liquidity mismatch* dana investasi dan memastikan kesiapan pelaku pasar yang lebih baik untuk lonjakan permintaan likuiditas yang tiba-tiba.

Isu strategis ketiga juga sangat penting karena berkaitan dengan bauran kebijakan makroekonomi dan makrofinansial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan sehingga pemulihan ekonomi global dapat berjalan lebih cepat. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi seluruh negara untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai *Macroeconomic Policy Mix* antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Beberapa kajian IMF dan Bank of International Settlement (BIS) akan memperkuat *Common Understanding/Principles* dalam kerangka kerja bauran kebijakan (*policy mix*). Kajian *Integrated Policy Framework* (IPF) oleh IMF mengelaborasi bauran kebijakan meliputi kebijakan moneter (suku bunga kebijakan), makroprudensial, *capital flow managements* (CFMs), dan nilai tukar. Kajian *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) oleh BIS melakukan asesmen keterkaitan antara kebijakan moneter dengan instrumen kebijakan bank sentral lainnya (kebijakan makroprudensial, CFMs, intervensi valas, dan intervensi di pasar domestik). Pemahaman terhadap IPF dan MFSF secara lebih terintegrasi dan komprehensif akan mendukung pencapaian *common understanding* terhadap *policy mix*.

Beberapa pelajaran penting dari pembahasan pada forum G20 dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi. *Lesson learned* dari pembahasan pada forum G20 menggarisbawahi bahwa kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara *pre-emptive* dan *forward looking* untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama yang dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam. Lebih jauh, selain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan untuk memitigasi risiko stabilitas keuangan. Dalam kaitan ini, pendekatan yang makin granular dan mikro makin penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Terkait stabilitas harga global, *lesson learned* juga menekankan bahwa koordinasi antara bank sentral dan Pemerintah makin diperlukan di tengah tantangan stabilitas harga yang bersumber dari sisi penawaran. G20 telah menggabungkan IPF dari IMF dengan MFSF dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Isu strategis keempat yang terkait dengan transformasi keuangan digital ditempuh dengan beberapa capaian konkret. Beberapa capaian terkait transformasi keuangan digital ini terutama terkait dengan (i) *cross-border payment;* (ii) CBDC, (iii) kerangka pengaturan dan pengawasan aset kripto; dan (iv) *digital financial inclusion.*

11 *FSB Report on US Dollar Funding and Emerging Market Economy Vulnerabilities.*

Presidensi G20 telah merumuskan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan konektivitas pembayaran lintas negara. Upaya tersebut setidaknya mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi pembayaran lintas batas, pembentukan elemen dasar untuk meningkatkan sistem yang ada dan mengembangkan sistem yang baru, serta pengaturan sistem pembayaran yang saling terkait. Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, FSB, *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI), dan mitra terkait berfokus pada penerapan *roadmap* yang telah disusun pada Presidensi G20 Arab Saudi 2020 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran lintas batas.[12]

Dalam kaitan dengan upaya untuk mendukung peningkatan konektivitas pembayaran lintas negara, 5 (lima) bank sentral di ASEAN telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) *on Cooperation in Regional Payment Connectivity* (RPC) pada 14 November 2022.[13] Selain untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di regional, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kerja sama ini juga mendukung aspirasi bersama ASEAN untuk sistem pembayaran yang saling terhubung sehingga memungkinkan pembayaran lintas batas yang cepat, lancar, dan lebih terjangkau di seluruh kawasan. Kerja sama ini sekaligus sebagai tonggak Keketuaan ASEAN tahun 2023 oleh Indonesia. Sementara itu, pada forum G20 juga dibahas mengenai pembentukan elemen dasar *roadmap* untuk meningkatkan sistem yang ada dan mengembangkan sistem yang baru.[14] Hal ini mencakup, antara lain, penyusunan laporan, fasilitasi peningkatan adopsi *payment versus payment* (PvP), hingga pengaturan untuk menghubungkan sistem pembayaran. Lebih lanjut, untuk mendukung pengaturan tersebut, laporan CPMI membahas mengenai kerangka kerja *interlinking* sistem pembayaran untuk membantu operator dan otoritas sistem pembayaran memahami manfaat, tantangan, dan risiko yang ada.[15] Pengaturan terkait *interlinking* sistem pembayaran ini penting untuk mempersingkat rantai transaksi, menekan biaya, dan meningkatkan transparansi dan kecepatan pembayaran.

Presidensi G20 Indonesia juga menempatkan CBDC sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam kaitan ini, Presidensi G20 memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai

12 *FSB report on G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments - priorities for the next phase of work*

13 Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT)

14 *G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments - Consolidated progress report for 2022*

15 *CPMI report on Interlinking Payment Systems and the Role of Application Programming Interfaces: A Framework for Cross-Border Payments*

implikasi CBDC terhadap sistem moneter dan keuangan internasional, penggunaan CBDC dalam *Cross-Border Payments*, serta fitur dan peran CBDC dalam ekonomi. Laporan CPMI memuat opsi akses dan interoperabilitas sistem CBDC untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas berdasarkan 5 (lima) kriteria: tidak membahayakan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan ketahanan, serta memastikan koeksistensi dan interoperabilitas dengan rel sistem pembayaran yang ada.[16] Sementara itu, Presidensi G20 Indonesia dan BIS Innovation Hub juga mengadakan kegiatan *G20 Techsprint 2022* untuk memperoleh solusi praktis dan layak dalam penerapan CBDC.

Di tengah diskusi dan perkembangan mengenai CBDC yang makin mengemuka, Bank Indonesia meluncurkan Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital. Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital. *White Paper* ini menjelaskan konfigurasi desain Rupiah Digital yang terintegrasi, fitur desain Rupiah Digital yang memungkinkan pengembangan model bisnis baru, arsitektur teknologi Rupiah Digital, serta dukungan perangkat regulasi dan kebijakan terhadap implementasi desain Rupiah Digital. Uraian mengenai Proyek Garuda ini dapat dilihat pada Bab 7-Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital.

Pembahasan aset kripto juga menjadi bagian dari agenda prioritas G20 mengenai pengembangan sistem pembayaran digital dan penguatan ketahanan di sektor keuangan. FSB bekerja sama dengan *standard-setting bodies* (SSBs) dan organisasi internasional menyampaikan 2 (dua) usulan dokumen, yaitu (i) rekomendasi untuk mendukung konsistensi peraturan, pengawasan dan *monitoring* terhadap aset kripto dan pasar aset kripto dan memperkuat kerja sama dan koordinasi internasional; serta (ii) tinjauan rekomendasi untuk regulasi, pengawasan, dan pengawasan pengaturan "*stable coin global*".

Terkait dengan *digital financial inclusion*, agenda pembahasan difokuskan untuk mendorong digitalisasi untuk mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan.[17] Presidensi G20 Indonesia dan GPFI telah merumuskan *Yogyakarta Financial Inclusion Framework* "Pemanfaatan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM yang Berkelanjutan dan Inklusif". Kerangka kerja ini menjadi panduan bagi regulator untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan. Beberapa *deliverables* yang telah dihasilkan adalah (i) *Implementation Guide for G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion* oleh *the World Bank in collaboration with BTCA, CGAP and OECD*. Laporan ini sebagai panduan untuk penerapan "G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion" yang dibangun pada 2016; (ii) *Living Database on Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs beyond Credit, for women entrepreneurs, youth entrepreneurs and social finance recipients by SME Finance Forum in collaboration with BTCA, IFAD, IsDB and WWB*. Laporan ini memuat kumpulan *best practices* penerapan di beberapa negara; (iii) *Preliminary Regulatory Toolkit for MSME Access to Digital Financial Services, prepared by AFI, in collaboration with OECD and WWB*. Kerangka analisis (*regulatory diagnostic toolkit*) ini bertujuan untuk memperkuat akses UMKM terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital; serta (iv) *Progressing Data Harmonization on MSMEs by SME Finance Forum and GPFI Co-Chairs*. Laporan ini memaparkan peran penting identifikasi pendekatan dan metode yang paling efisien untuk melakukan harmonisasi data untuk pengembangan inklusi keuangan digital.

Isu strategis kelima terkait dengan upaya memperkuat pembahasan berbagai rekomendasi untuk mendukung pembentukan keuangan berkelanjutan. Berbagai rekomendasi tersebut, antara lain, upaya untuk mengembangkan

16 *CPMI, BIS Innovation Hub, IMF, World Bank report on Options for Access to and Interoperability of CBDCs for Cross-Border Payments*

17 *The Global Partnership for Financial Inclusion* (GPFI) 2022

pembiayaan transisi menuju *net zero emission*, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrumen dan pasar keuangan berkelanjutan. Secara garis besar, pembahasan berbagai rekomendasi terkait keuangan berkelanjutan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu (i) *sustainable finance*; (ii) *sustainable infrastructure*; (iii) risiko keuangan terkait perubahan iklim. Pada aspek *sustainable finance*, pembahasan difokuskan pada upaya mobilisasi keuangan berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global, serta mendorong transisi menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih hijau, lebih tangguh, dan inklusif. Hasil nyata ditunjukkan oleh G20 2022 *Sustainable Finance Report* yang memuat tindak lanjut dari rekomendasi *Sustainable Finance Roadmap*, hasil pembahasan mengenai Kerangka Pembiayaan Transisi, Kredibilitas Komitmen Lembaga Keuangan Sektor Swasta, dan Instrumen Keuangan Berkelanjutan, serta kesimpulan utama tentang *policy levers* untuk investasi berkelanjutan.

Pada topik *sustainable infrastructure*, pembahasan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pengurangan ketimpangan regional dari segi infrastruktur, infrastruktur digital, dan standar pengembangan infrastruktur berkualitas. G20 telah menghasilkan laporan "*Report on Inclusive Infrastructure Investment: Addressing regional disparities in future infrastructure needs in the wake of the COVID-19 crisis*". Laporan ini memuat jenis investasi yang diperlukan untuk memaksimalkan *social return* dan menjembatani kesenjangan terhadap akses ke layanan. Selain itu, laporan tersebut juga memaparkan 2 (dua) implikasi utama untuk investasi infrastruktur, yaitu: (i) perlunya jenis investasi yang strategis dan fleksibel, yang disesuaikan dengan kondisi demografis, serta (ii) perlunya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan investasi infrastruktur yang berkualitas.

Pada topik risiko keuangan terkait perubahan iklim, G20 menggarisbawahi fenomena perubahan iklim yang makin nyata akan membawa implikasi bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global ke depan. Dalam kaitan ini, G20 memandang perlunya manajemen risiko yang efektif dalam membangun ketahanan sistem keuangan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Penyusunan *FSB Roadmap for Addressing Climate-related Financial Risks* pada tahun 2021 merupakan dasar dalam penyusunan tindak lanjut dari *roadmap* dimaksud pada 2022. Laporan FSB tersebut juga didukung oleh 3 (tiga) capaian konkret lainnya. *Pertama*, laporan *Progress Report on Climate-Related Disclosures* yang memuat penguatan *disclosure* terkait iklim pada level korporasi sebagai dasar penetapan harga dan pengelolaan risiko keuangan. Laporan tersebut juga diperkuat oleh temuan dari *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD) *Status Report* 2022 yang memuat praktik *corporate disclosure* terkait iklim. *Kedua*, laporan *Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks – Final Report* yang bertujuan untuk membantu pengawas dan regulator mengembangkan berbagai pendekatan guna memantau, mengelola, dan memitigasi risiko yang timbul dari perubahan iklim. Selain itu, ditekankan bahwa pendekatan harus bersifat konsisten untuk seluruh sektor dan yurisdiksi. *Ketiga*, laporan *FSB-NGFS Climate Scenario Analysis by Jurisdictions* yang memaparkan analisis dari hasil simulasi skenario iklim yang dilakukan oleh otoritas di tingkat korporasi dan sistem keuangan. Tujuan laporan adalah melihat gambaran besar hasil simulasi yang dilakukan oleh berbagai negara dan menarik pelajaran sebagai dasar bagi rekomendasi kebijakan ke depan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan.

6.2.3. Penyelenggaraan *Side Events* G20

Dalam rangka mendukung pembahasan agenda prioritas ataupun substansi dalam forum G20, Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan diskusi melalui berbagai *side event*. Pelaksanaan *side event* G20 ditujukan untuk mempromosikan ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia sebagai respons terhadap pandemi Covid, serta sebagai upaya untuk mempromosikan pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi. *Side event* juga dijadikan sarana untuk mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global, mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri

kreatif, serta mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya. Dalam pelaksanaannya, *side event* juga difungsikan sebagai wadah bagi pihak eksternal di luar G20 untuk menyampaikan masukan terkait berbagai isu strategis. Hal ini mengingat pertemuan utama G20 berbentuk sidang tertutup sehingga hanya dapat diikuti oleh delegasi.

Sepanjang Presidensi G20 Indonesia, *side event* mengangkat berbagai tema besar yang sejalan dengan agenda prioritas G20. Tema tersebut khususnya terkait dengan kebijakan *exit strategy*, *scarring effect*, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, dan inklusi keuangan (Tabel 6.1). Secara nasional, berbagai kementerian/lembaga menjadi penyelenggara bagi *side event* yang mengangkat beragam topik. Secara lebih terperinci, Bank Indonesia menjadi penyelenggara bagi 90 kegiatan atau 40% dari keseluruhan *side event* nasional. *Side event* Bank Indonesia umumnya dilaksanakan pada Februari dan Juli 2022 sebagai bagian dari rangkaian acara pertemuan *Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) G20.

Pembahasan dalam *side events* dilakukan melalui serangkaian *High Level Seminar* Presidensi G20 Indonesia, yang antara lain mengangkat isu strategis terkini khususnya terkait dengan ketahanan pangan dan bauran kebijakan. *High Level Seminar* merupakan bagian dari rangkaian *High-Level Meeting 3rd FCBD* dan *3rd FMCBG* pada 13-16 Juli 2022. Terdapat sejumlah *key-takeaways* dari masing-masing *high level* seminar tersebut. *Pertama*, *High Level Seminar* dengan topik *Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity* pada 15 Juli 2022 membahas tentang bagaimana G20 memimpin upaya global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan. Seminar ini menggarisbawahi perlunya menghindari kebijakan yang kontraproduktif seperti pelarangan ekspor, hambatan perdagangan dan penimbunan yang dapat mendistorsi pasar dan menimbulkan kenaikan harga pangan. Selain itu, seminar juga mendiskusikan peran kebijakan fiskal berbasis digital untuk membantu kelompok paling rentan dalam menghadapi kondisi saat ini, termasuk dalam mengatasi kerawanan pangan. *Kedua*, *High Level Seminar* dengan topik *Macroeconomic Policy Mix for Stability and Economic Recovery* pada 15 Juli 2022 mendalami pentingnya bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi. Dalam pemaparannya, menteri keuangan AS menyampaikan 3 (tiga) pembelajaran dari krisis-krisis sebelumnya dalam menghadapi dinamika perekonomian global saat ini, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan lanskap perekonomian global, pentingnya kerangka kebijakan yang kokoh, dan pentingnya pemantauan terhadap volatilitas aliran modal.

Tabel 6.1. Tema *Side Events* Presidensi G20 Indonesia

Bulan	Tema Besar
Januari	*Exit Strategy*
Februari	*Exit Strategy, Digitalization (for FI and on CBP) and Green Financing*
Maret	*Exit Strategy, Scarring Effect, Digital Infrastructure and Macrofinancial Challenge of Digital Currencies*
April	*Exit Strategy, Scarring Effect, Digitalization, Sustainable Economy*
Mei	*Financial Inclusion*
Juni	*Digitalization, Strengthening Financial Resilience*
Juli	*Digitalization, Green Economy and Finance, Infrastructure*
Agustus	RI Bangkit dan Optimis Bersama G20
September	*Sustainable Investments*
Oktober	*Recover Together, Recover Stronger*
November	Diseminasi Presidensi G20 Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Presidensi G20 Indonesia juga menyelenggarakan *Gala Seminar* yang membahas sejumlah isu strategis terkini yang berkaitan dengan bauran kebijakan makrofinansial, CBDC, dan keuangan berkelanjutan. *Gala Seminar* pada 17 Juli 2022 mengangkat topik *Monetary and Financial Sector Policy to Support Stability and Recovery*, dan membahas tentang bagaimana kebijakan moneter dan sektor keuangan dapat mendukung stabilitas keuangan dan pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan prioritas yang perlu diterapkan, antara lain, (i) melanjutkan pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi tingkat inflasi yang tinggi, (ii) menjaga independensi bank sentral, (iii) menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mengatasi peningkatan risiko di sektor keuangan, dan (iv) implementasi *foreign exchange intervention* (FXI) dan *capital flow management measures* (CFMs) untuk memitigasi risiko makroekonomi dan stabilitas keuangan yang disesuaikan dengan kondisi di setiap negara. Selanjutnya, *Gala Seminar* dengan topik *Central Bank Digital Currency and Crypto-Assets* pada 17 Juli 2022 membahas tentang penggunaan CBDC, regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi CBDC, dan desain CBDC yang sesuai untuk mendukung perekonomian. Pada kesempatan ini, juga didiskusikan potensi manfaat CBDC untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung sistem pembayaran lintas negara. Selain itu, seminar ini juga membahas upaya memastikan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif terhadap *crypto-assets*, termasuk aspek perlindungan konsumen dan edukasi. Sementara itu, *Gala Seminar* dengan topik *Green Economy and Finance* pada 17 Juli 2022 membahas tentang bagaimana G20 memperkuat komitmen untuk mengatasi tantangan perubahan iklim serta pencapaian SDGs melalui keuangan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, didiskusikan pentingnya partisipasi sektor swasta dan implementasi *country platform* dalam meningkatkan pembiayaan di sektor hijau, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) dan infrastruktur hijau.

6.3

Pelajaran dari Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia

Presidensi G20 Indonesia berjalan sangat baik dan mampu menghasilkan komunike bersama dari seluruh anggota G20 , meskipun pada saat bersamaan tensi ketegangan geopolitik masih tinggi. Presidensi G20 Indonesia berhasil melahirkan komunike dalam G20 Bali *Leaders' Declaration* pada KTT G20, November 2022. Dalam komunike tersebut, G20 berkomitmen untuk secara terkoordinasi memajukan agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh serta pembangunan berkelanjutan melalui 5 (lima) langkah. *Pertama*, melakukan investasi publik dan reformasi struktural, mendorong investasi swasta, dan memperkuat perdagangan multilateral dan ketahanan rantai pasok global. *Kedua*, menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar. *Keempat*, membuka investasi lebih luas untuk negara berkembang melalui pembiayaan inovatif. *Kelima*, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/ SDGs), mencapai kesejahteraan bagi semua melalui pembangunan berkelanjutan.[18]

Keberhasilan memperoleh komunike bersama tersebut tidak terlepas dari proses diplomasi Indonesia yang kuat kepada negara-negara G20 untuk tetap melanjutkan pertemuan di tengah tekanan dari beberapa negara utama G20 terkait krisis geopolitik Rusia-Ukraina. Diplomasi Indonesia juga berhasil memastikan seluruh sidang yang sudah dijadwalkan dapat dilaksanakan dengan baik yang mencerminkan komitmen negara anggota G20 dalam menjaga keutuhan forum G20. Dalam tataran implementasi, keberhasilan G20 tecermin pada penandatanganan *Regional Payment Connectivity* (RPC) oleh 5 (lima) bank sentral ASEAN. Penandatanganan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran lintas batas di antara negara-negara ASEAN untuk mendukung pemulihan ekonomi regional dan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Satu pelajaran penting dari kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia di tengah tensi geopolitik global tersebut ialah peran penting sinergi yang kuat, baik antar-pemangku kepentingan di Indonesia maupun koordinasi dengan negara-negara anggota, dalam mencapai tujuan bersama pemulihan ekonomi global. Koordinasi Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dilakukan sangat erat untuk membangun strategi dan mencapai kata sepakat di Jalur Keuangan di tengah tantangan sulitnya mencapai konsensus. Berbagai upaya ditempuh, termasuk melalui identifikasi isu-isu yang sensitif terhadap perang Rusia-Ukraina, serta komunikasi secara bilateral dengan seluruh kementerian keuangan dan bank sentral untuk mendapat dukungan agar mencapai konsensus. Upaya tersebut disertai dengan membangun *chairs' summary* yang meringkas isu-isu yang mendapat kesepakatan dan tidak memperoleh kesepakatan.

Sinergi yang kuat tersebut menopang keberhasilan Presidensi G20 Indonesia yang telah menghasilkan satu FMCBG *Communique*[19] dan tiga FMCBG *Chairs' Summary* yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan terkait isu-isu koordinasi kebijakan ekonomi. Pencapaian di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Jalur Keuangan ini telah mendorong suksesnya konsensus di tingkat kepala negara/kepala pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan adopsi G20 Bali *Leaders' Declaration* yang merupakan dokumen konsensus para pemimpin negara di KTT G20 pada November 2022. Pencapaian konsensus di tingkat pemimpin negara ini telah menunjukkan bahwa seluruh anggota

18 Diambil dari G20 Bali *Leaders' Declaration*

19 *Communique* adalah suatu dokumen bersama anggota G20 (di jalur keuangan terdiri menteri keuangan dan gubernur bank sentral) yang berisi komitmen dan pernyataan bersama untuk disampaikan kepada publik mengenai agenda prioritas dan isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama. *Communique* merupakan hasil konsensus yang harus disepakati oleh seluruh negara anggota G20.

G20 tetap bersepakat untuk mendorong koordinasi kebijakan ekonomi serta mewujudkan tema Presidensi G20 Indonesia, "*Recover Together, Recover Stronger*" di tengah berbagai tantangan.

Keberhasilan sinergi dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi landasan awal bagi Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 untuk menjadikan "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*". Kerja sama di ASEAN terdiri dari 3 (tiga) pilar, yakni politik pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya. Masing-masing pilar tersebut diturunkan kepada beberapa K/L sektoral, dengan salah satu bagian dari pilar ekonomi, yakni jalur keuangan (*finance track*) beranggotakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, ASEAN dapat memanfaatkan pencapaian yang disepakati dalam G20 untuk pertumbuhan ekonomi di ASEAN, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi, stabilitas keuangan dan berpegang pada prinsip-prinsip ASEAN. Melalui tema "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*", Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan, serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga akan memperkuat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang inklusif untuk kawasan yang damai, saling terhubung, inklusif, dan kompetitif.[20]

Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan mengangkat tiga isu prioritas bidang ekonomi. Ketiga isu prioritas tersebut adalah *recovery and rebuilding*, *digital economy*, dan *sustainability*. *Pertama*, Indonesia akan mendorong prospek pemulihan untuk membangun kembali pertumbuhan regional, konektivitas, dan daya saing, serta memperkuat ketahanan pangan dan keuangan dengan memastikan rantai pasok pangan. *Kedua*, Indonesia berupaya mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif, serta meningkatkan infrastruktur digital yang berkualitas untuk menjembatani kesenjangan digital. *Ketiga*, Indonesia akan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong isu *blue economy* dan peralihan menuju energi terbarukan dengan tetap selaras pada prinsip-prinsip aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan bagi masyarakat ASEAN.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 di bidang ekonomi, ASEAN perlu merumuskan agenda prioritas yang selaras dengan Presidensi G20 Indonesia. Agenda prioritas tersebut dapat dirumuskan berdasarkan tiga isu prioritas ekonomi, yaitu *recovery and rebuilding*, *digital economy*, dan *sustainability* yang diselaraskan dengan keenam agenda prioritas G20. Terkait hal ini, Bank Indonesia di antaranya akan secara konsisten mendorong penciptaan stabilitas makroekonomi dan keuangan melalui diversifikasi penggunaan mata uang di ASEAN menggunakan *Local Currency Transaction* (LCT). Penggunaan LCT ini akan melengkapi upaya pengembangan *interlinking* dan konektivitas pembayaran lintas batas (*cross-border payment*) di ASEAN, sebagai perwujudan dari *Regional Payment Connectivity* yang diinisiasi di KTT Presidensi G20 Indonesia.

20 Diambil dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Fokus Pada Penguatan Ekonomi Kawasan yang Tumbuh Cepat, Inklusif, dan Berkelanjutan, Indonesia Jalankan Keketuaan ASEAN 2023, 19 Januari 2023.